

INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI ANGGARAN (KIA) PROVINSI RIAU DAN 12 KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024

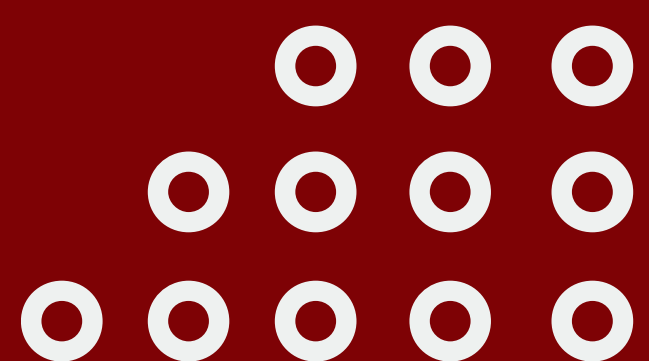


POLICY BRIEF

Penulis
Tarmidzi

Tim Peneliti

- Arsilia Intan Syahrani
- Syafiqah Suud Helmi
- Syahrudin
- Puja Audyna
- Septian zakinoval



1. Latar Belakang

Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) merupakan alat untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah dalam hal ini, Provinsi Riau, memberikan akses kepada masyarakat terhadap informasi publik yang relevan dan dibutuhkan. Keterbukaan informasi adalah bagian dari upaya transparansi pemerintahan yang mendukung prinsip-prinsip demokrasi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Pemerintah Provinsi Riau, sebagai bagian dari negara Indonesia, memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses oleh publik sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam konteks ini, Provinsi Riau harus memastikan bahwa informasi yang dikelola oleh badan publik dapat diakses oleh masyarakat secara transparan, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta mengurangi potensi praktik korupsi.

Penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik Daerah di Provinsi Riau Tahun 2024 menjadi penting untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota telah memenuhi kewajiban tersebut. Indeks ini akan mencakup berbagai dimensi, antara lain: kualitas penyajian informasi, kemudahan akses, serta tingkat keterlibatan publik dalam memperoleh dan memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah. Penilaian IKIP ini juga berfungsi untuk memotivasi pemerintah daerah untuk lebih terbuka dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mendorong perbaikan dalam pengelolaan informasi publik secara berkelanjutan. Dengan adanya IKIP yang lebih baik, diharapkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat semakin harmonis, serta tercipta iklim pemerintahan yang lebih akuntabel dan demokratis.

Provinsi Riau terdiri dari berbagai kabupaten dan kota, termasuk Pekanbaru, Dumai, Bengkalis, Siak, Indragiri Hilir (Inhil), Indragiri Hulu (Inhu), Rokan Hulu (Rohul), Rokan Hilir (Rohil), Kepulauan Meranti, Pelalawan, Kampar, dan Kuansing. Setiap daerah memiliki tingkat perkembangan dan tantangan yang berbeda dalam menerapkan keterbukaan informasi publik. Misalnya, Pekanbaru, sebagai ibu kota Provinsi Riau, memiliki infrastruktur yang lebih baik dan akses internet yang lebih luas dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya yang lebih terpencil, seperti Kepulauan Meranti atau Rohul, yang mungkin masih menghadapi keterbatasan dalam hal infrastruktur dan sumber daya manusia.

Indeks Keterbukaan Informasi Publik ini secara konsisten dilakukan oleh Fitra Riau Setiap tahunnya, untuk memotret kinerja keterbukaan informasi anggaran pemerintah daerah, yang mencakup Provinsi Riau dan 12 kabupaten/kota di Riau. Indeks Keterbukaan Informasi Publik Daerah merupakan alat yang sangat penting untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah di Provinsi Riau membuka akses informasi kepada publik. Meskipun ada tantangan, langkah-langkah yang tepat dapat diambil untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas.

dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Dengan meningkatkan keterbukaan informasi publik, pemerintah daerah dapat menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. adapun hasil ini diharapkan berkontribusi dalam memberikan input kepada pemerintah untuk meningkatkan kinerja keterbukaan informasi anggaran secara proaktif

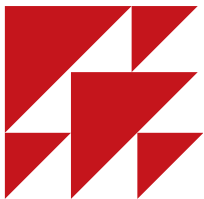
2. Tujuan

Adapun tujuan dari melakukan indeks keterbukaan informasi publik pemerintah daerah, adalah;

- Mengukur sejauh mana kinerja keterbukaan informasi anggaran (KIA) pemerintah daerah Provinsi Riau dan 12 Kabupaten/kota;
- Menyusun hasil indeks keterbukaan informasi Anggaran (KIA) pemerintah daerah se – Riau tahun 2024;
- Mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

3. Metode dan Ruang Lingkup

- Studi ini menggunakan metode tracking website pemerintah untuk melihat ketersediaan informasi/dokumen yang berkaitan rencana pembangunan dan dokumen penganggaran secara lengkap dan mudah diakses. Sehingga metode penilaian yang ditetapkan terdapat empat kategori, seperti; nilai 4: informasi tersedia secara lengkap full document, nilai 3: informasi yang tersedia hanya sebagian, nilai 2: informasi yang tersedia hanya ringkasan informasi, dan nilai 1: informasi yang tersedia hanya regulasi terkait kebijakan rencana pembangunan dan penganggaran. Selanjutnya dari masing-masing nilai indeks maka ditetapkan kedalam kategori penilaian yaitu; kategori sangat rendah antara 0,00-0,20, kategori rendah antara 0,20-0,40, kategori cukup antara 0,40-0,60, kategori baik antara 0,60-0,80, kategori sangat baik antara 0,80-100.
- Ruang lingkup penilaian indeks KIA dibatasi pada dokumen informasi perencanaan dan penganggaran dalam dua tahun terakhir 2023-2024, terdiri dari empat dimensi yaitu: (1) Dimensi 1: informasi perencanaan pembangunan daerah (RPJMD, RKPD),(2) Dimensi 2: informasi rancangan penganggaran (Rancangan KUA PPAS, Rancangan RKA, dan Rancangan RAPBD), Dimensi 3: Dokumen Anggaran yang telah ditetapkan (KUA PPAS, APBD, dan DPA), Dimensi 4: informasi pertanggungjawaban anggaran (LKPD dan LHP BPK). Penelusuran informasi melalui website pemerintah daerah dilakukan dan dibatasi sejak tanggal 18 November – 20 Desember 2024.



Instrumen Keterbukaan Informasi Anggaran Tahun 2023-2024

Dimensi	Bobot	Dokumen Informasi	Nilai
Dokumen Perencanaan Pembangunan	0,15	- RPJMD Priode 2021-2026	1. Publikasi Full (4) 2. Publikasi Sebagian (2) 3. Publikasi Ringkasan (1) 4. Tidak ada publikasi (0)
		- RKPD 2024	
		- RKPD 2025	
Dokumen Proses Penganggaran	0,30	- Rancangan KUA 2024	1. Publikasi Full (4) 2. Publikasi Sebagian (2) 3. Publikasi Ringkasan (1) 4. Tidak ada publikasi (0)
		- Rancangan KUA 2025	
		- Rancangan PPAS 2024	
		- Rancangan PPAS 2025	
		- Dokumen RKA 2024	
		- Dokumen RKA 2025	
		- RAPBD 2024	
Dokumen Anggaran	0,30	- RAPBD 2025	1. Publikasi Full (4) 2. Publikasi Sebagian (2) 3. Publikasi Ringkasan (1) 4. Tidak ada publikasi (0)
		- Dokumen KUA 2024	
		- Dokumen KUA 2025	
		- Dokumen PPAS 2024	
		- Dokumen PPAS 2025	
		- Dokumen APBD (Perda) 2024	
		- Dokumen APBD (Perda) 2025	
Dokumen Pertanggungjawaban/ Audit	0,25	- Dokumen Penjabaran APBD 2024	1. Publikasi Full (4) 2. Publikasi Sebagian (2) 3. Publikasi Ringkasan (1) 4. Tidak ada publikasi (0)
		- Dokumen DPA 2024	
		- Dokumen LKPD 2022	
		- Dokumen LKPD 2023	
		- Dokumen LHP BPK 2022	
		- Dokumen LHP BPK 2023	

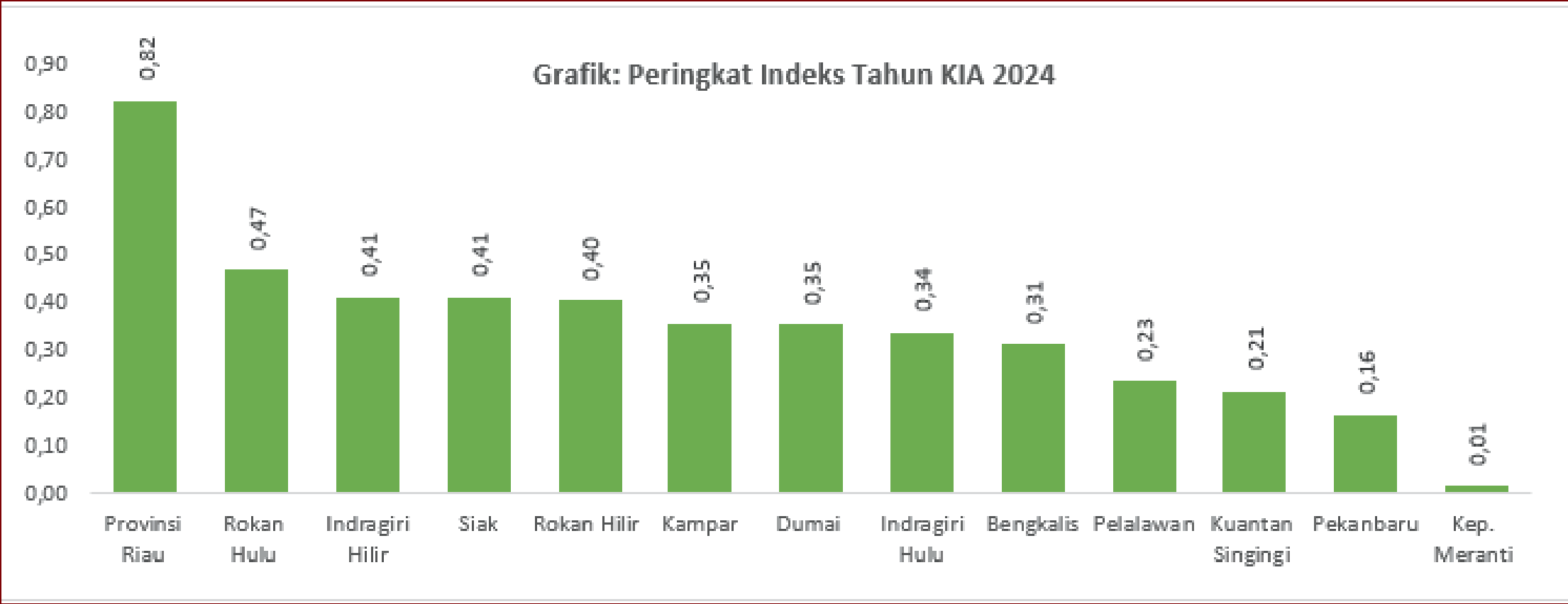
B. Pemeringkatan Indeks Keterbukaan Informasi Anggaran (KIA)

Fitra Provinsi Riau secara konsisten setiap tahunnya melakukan pemeringkatan kinerja keterbukaan informasi anggaran terhadap pemerintah provinsi Riau dan 12 Kabupaten/kota se-Riau. Pemeringkatan ini dilaksanakan dengan pendekatan penelusuran saluran informasi resmi pemerintah daerah yang bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan pemerintah daerah terhadap amanat UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik, salah satunya informasi yang wajib diumumkan secara berkala dan tersedia setiap saat adalah informasi perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.

C. Hasil Indeks KIA Tahun 2024

Indeks Keterbukaan Informasi Anggaran (KIA) tahun 2024 menunjukkan hasil yang bervariasi yang antar daerah, nilai dari keseluruhan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota tidak ada yang mendapatkan nilai dalam kategori baik. Kinerja tertinggi pemerintah daerah mencapai kategori sangat baik yaitu Pemerintah Provinsi Riau dengan nilai indeks 0,87 poin naik dari tahun sebelumnya 2023 sebesar 0,78 poin.

Sedangkan pemerintah kabupaten/kota niai tertinggi mencapai kategori cukup yaitu Rokan Hulu, Indragiri Hilir, Siak dan Rokan hilir dengan nilai antara 0,40-0,57 poin. Selain itu, Daerah yang mendapatkan nilai kategori rendah yaitu kabupaten Kampar, Dumai, Indragiri Hulu, Bengkalis, Pelalawan dan Kuansing dengan nilai indeks antara 0,21-0,35 poin. selebihnya daerah dengan nilai sangat rendah yaitu Pekanbaru dan Kep. Meranti dengan nilai antara 0,01-0,16 poin.

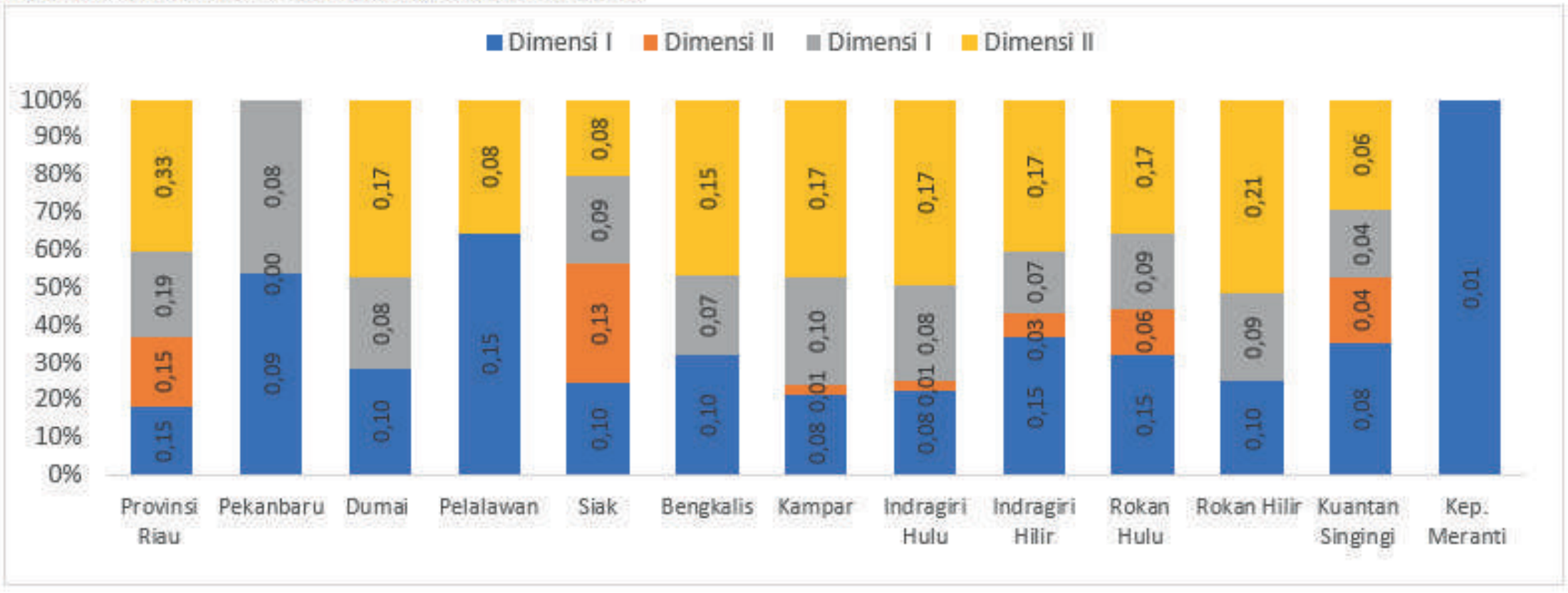


Dari angka tersebut menunjukan bahwa belum semua daerah di Provinsi Riau secara lengkap mempublikasikan informasi anggaran, bahkan terhadap daerah dengan nilai rendah dan sangat rendah perlu meningkatkan kinerja keterbukaan informasi anggaran yang dipublikasi secara proaktif melalui saluran informasi yang tersedia, dan untuk lebih efektif pengelolaan informasi dikelola secara terpadu melalui peran Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, partisipatif dan akuntabel sesuai mandate UU. No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

D. Hasil Indeks KIA 2024 Berdasarkan Penilaian 4 Dimensi

Penilaian Keterbukaan Informasi Anggaran (KIA) diukur berdasarkan empat dimensi yaitu; Dimensi 1; Dokumen Perencanaan Pembangunan, Dimensi 2; Dokumen Proses Penganggaran, Dimensi 3; Dokumen Anggaran, dan Dimensi 4; Dokumen Pertanggungjawaban. Dari empat dimensi yang diukur tersebut, Provinsi Riau memiliki informasi yang lengkap dan tersedia dalam website, sedangkan pada kabupaten/kota informasi yang tersedia tidak lengkap dari empat aspek tersebut, sebagian informasi yang tersedia hanya berkaitan dengan informasi perencanaan pembangunan (dimensi 1) dan ringkasan APBD (dimensi 3). Ini menunjukan bahwa pemerintah kabupaten/kota belum mematuhi amanat perundang-undangan untuk membuka informasi anggaran mulai pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

Grafik: Indeks KIA Berdasarkan Dimensi

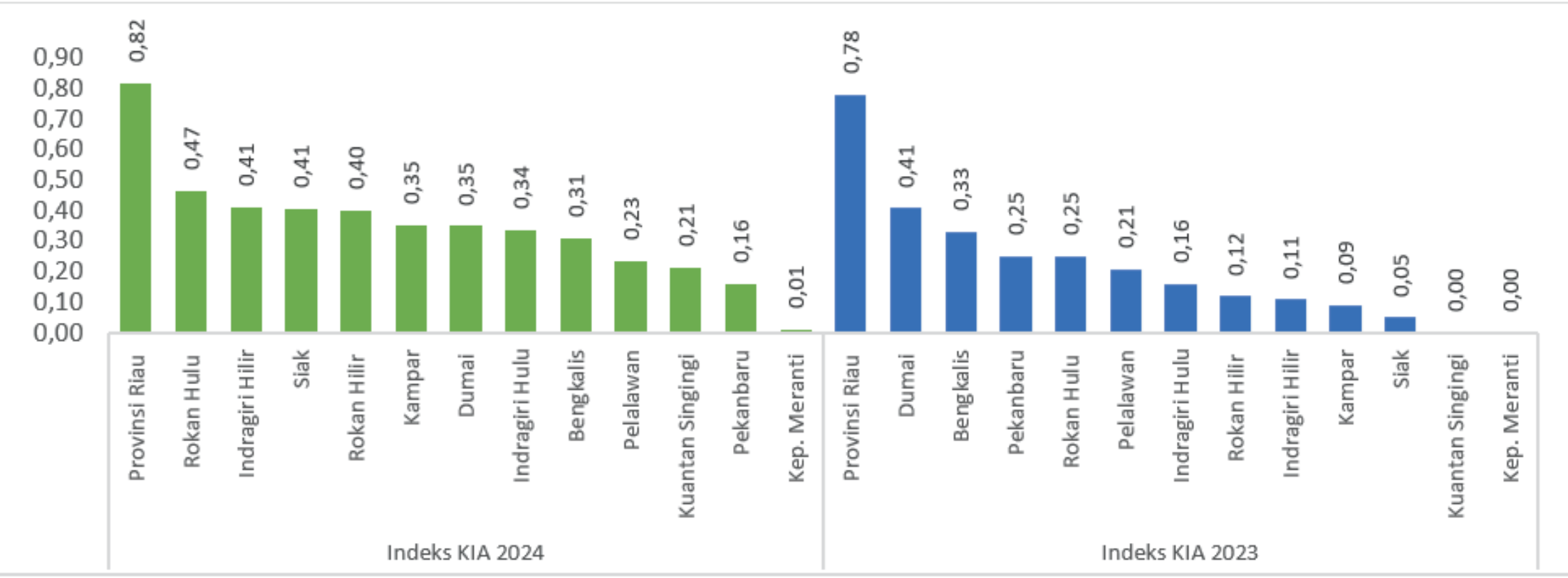


Dari empat dimensi yang diukur, daerah yang memenuhi semua dimensi terdapat tujuh (7) daerah dengan nilai yang bervariasi yaitu Provinsi Riau, Kabupaten Siak, Kampar, Inhu, Inhil, dan Kuansing, sedangkan daerah lainnya hanya terpenuhi 1-3 dimensi, bahkan kabupaten kepulauan meranti hanya terdapat satu dimensi. Bobot masing-maissng dimensi tersebut ditetapkan secara berbeda, Dimensi dengan bobot yang tertinggi terdapat pada dimensi informasi dokumen anggaran yang cenderung semua daerah tidak terpenuhi sehingga berpengaruh pada nilai indeks kinerja keterbukaan informasi anggaran.

E. Perbandingan Indeks KIA Tahun 2023-2024

Tren Indeks Keterbukaan Informasi Anggaran (KIA) dari tahun 2023-2024 di Provinsi Riau menunjukkan penurunan keterbukaan anggaran di sebagian besar daerah. Secara umum, Provinsi Riau mengalami peningkatan dari 0,78 poin pada tahun 2023 naik menjadi 0,87 poin ditahun 2024. Untuk pemerintah kabupaten/kota secara rata-rata mengalami peningkatan kinerja dari tahun 2023 nilai rerata kabupaten/kota sebesar 0,17 poin, naik pada tahun 2024 secara rerata menjadi 0,31 poin. Pemerintah daerah yang mengalami peningkatan kinerja terdapat 8 daerah diantaranya kabupaten Rokan Hulu, Inhil, Siak, Rokan Hilir, Kampar, Inhu, Pelalawan, Kuansing. Sedang empat daerah lainnya mendapat nilai sama dengan atau turun dari tahun sebelumnya.

Grafik: Perbandingan Indeks KIA tahun 2023-2024



F. Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil indeks keterbukaan informasi anggaran (KIA) yang ditelusuri dan dinilai pada tahun 2024 sebagaimana diuraikan diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut;

Kesimpulan;

- Berdasarkan empat aspek penilaian Indeks KIA, belum semua indikator penilaian terpenuhi secara lengkap terutama yang menyangkut dengan dokumen proses penganggaran dokumen anggaran dan dokumen pertanggungjawaban anggaran, informasi yang berkaitan dengan penganggaran ini yang ditemukan masih berupa ringkasan dokumen.
- Hasil indeks KIA tahun 2024 dari keseluruhan daerah terjadi peningkatan kinerja dengan nilai indeks KIA rerata 0,34 poin, dari tahun sebelumnya hanya 0,21 poin. Provinsi Riau justru mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dari 0,78 poin tahun 2023 naik menjadi 0,87 poin tahun 2024. Nilai indeks Kabupaten/kota mengalami peningkatan terdapat 8 daerah, dan 4 daerah mendapat nilai sama dengan dan turun dari tahun sebelumnya, secara rerata indeks kabupaten/kota mencapai 0,31 poin dari tahun sebelumnya sebesar 0,17 poin.
- Kinerja Keterbukaan Informasi Anggaran tertinggi dari keseluruhan pemerintah daerah masih terdapat pada dimensi dokumen rencana pembangunan, sedangkan pada dimensi dokumen proses penganggaran, dokumen anggaran dan pertanggungjawaban masih sangat minim.
- Hasil indeks KIA 2024 menunjukkan terdapat empat daerah yang masih dalam kategori sangat rendah dengan indeks antara 0,01-0,16 poin, yaitu Pekanbaru dan Kep. Meranti.

Rekomendasi:

1. Peningkatan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia: Beberapa daerah, seperti Kabupaten Meranti dan Kepulauan Riau, yang memiliki keterbatasan dalam infrastruktur dan sumber daya manusia, perlu mendapatkan dukungan untuk meningkatkan kapasitas dalam mengelola dan mempublikasikan informasi anggaran secara efektif.
2. Penguatan Peran OPD Terkait: Pemerintah daerah perlu memperkuat peran OPD yang bertanggung jawab atas keterbukaan informasi publik, seperti Bappeda, Kominfo, dan DPKAD/BKD, agar mereka lebih aktif dalam menyajikan data anggaran yang akurat, lengkap, dan mudah diakses oleh masyarakat.
3. Penyusunan Kebijakan yang Mendukung Keterbukaan Anggaran: Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus menyusun kebijakan yang lebih mendukung dan mendorong keterbukaan anggaran, termasuk dengan memastikan bahwa dokumen anggaran, perencanaan, dan laporan keuangan dipublikasikan secara lengkap dan dapat diakses dengan mudah oleh publik.

4. Pemantauan dan Evaluasi Secara Rutin: Melakukan pemantauan dan evaluasi secara rutin terhadap implementasi keterbukaan informasi anggaran di setiap daerah, serta memberikan penghargaan bagi daerah yang menunjukkan kemajuan signifikan dalam transparansi anggaran, dapat menjadi pendorong bagi daerah lainnya untuk memperbaiki kinerja keterbukaan informasi anggaran mereka.